

ISSN 2828-285x



PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 7 No. 2 Tahun 2025

Reformasi Sistem Pendidikan sebagai Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Penulis

Sri Rahayu Ningsih¹, Rafika Nanda¹, Dwi Hastuti¹

¹ Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, IPB University

Reformasi Sistem Pendidikan sebagai Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- 1) Momen 100 tahun kemerdekaan, Indonesia Emas atau Indonesia Cemas?
- 2) Kurikulum pendidikan yang tidak stabil, minimnya kesejahteraan guru, lemahnya kolaborasi orang tua dan guru, dan fasilitas pendidikan yang timpang.
- 3) Pemerintah harus menyelesaikan tantangan pendidikan dari akar masalah dan memastikan implementasi kebijakan dilakukan secara konsisten, berkelanjutan, dan berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 4) Reformasi pendidikan harus bersifat lintas generasi dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek agar mampu mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantang global.

Ringkasan

Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan. Namun, Impian besar ini bisa kandas jika persoalan mendasar di dunia pendidikan tidak segera dibenahi. Saat ini, Indonesia masih bergulat dengan sistem pendidikan yang tidak stabil, guru yang kurang sejahtera, minimnya kolaborasi sekolah dan orang tua, serta fasilitas pendidikan yang timpang. Akibatnya, lahir generasi muda yang rapuh secara kognitif dan emosional, mereka terjebak dalam fenomena *brain rot*, paparan pornografi, dan krisis karakter. Artikel ini menawarkan pendekatan strategis dan tajam untuk membalikkan situasi, mulai dari reformasi kurikulum pendidikan berbasis jangka panjang, peningkatan kesejahteraan guru, penguatan peran orang tua, hingga revitalisasi fasilitas sekolah. Keempat pilar ini adalah fondasi yang saling menguatkan untuk menciptakan sumber daya unggul yang menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045. Simak selengkapnya untuk memahami bagaimana perubahan nyata bisa dimulai hari ini.

Kata kunci: Indonesia Emas 2045, Kesejahteraan Guru, Kolaborasi Pendidikan, Kurikulum Berbasis Karakter, Reformasi Pendidikan

Pendahuluan

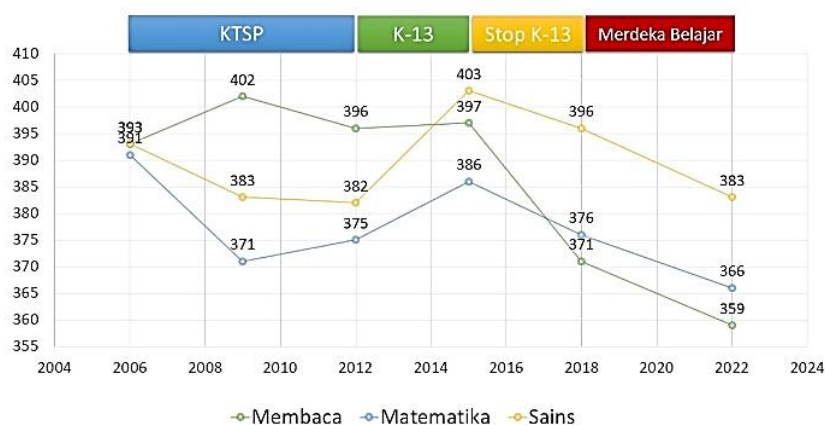
Wacana “Indonesia Emas 2045” mulai digaungkan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai visi besar bangsa dalam menyongsong satu abad kemerdekaan. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur dengan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di kancah global (Dewi 2019; Muthiariny 2019). Visi ini menekankan pentingnya Pembangunan manusia melalui pendidikan, inovasi, dan ketahanan sosial sebagai fondasi utamanya. Namun, sejumlah tantangan besar menghambat jalan menuju visi tersebut, terutama di sektor pendidikan. Di antaranya adalah rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia yang sangat timpang dibanding negara-negara tetangga (Adhiat 2023). Ketimpangan ini turut berdampak pada rendahnya motivasi dan kualitas pengajaran di sekolah (Hutasuhut *et al.* 2025). Selain itu, persoalan mendasar lain yang belum terselesaikan adalah ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar daerah, khususnya kawasan perkotaan dan daerah tertinggal, yang menciptakan jurang ketidaksetaraan dalam kesempatan belajar.

Meski RPJPN 2025-2045 telah menempatkan pendidikan berkualitas dan merata sebagai prioritas dalam misi Transformasi Sosial (IE2) (Bappenas 2025), tanpa langkah kongkret dan komitmen pemerintah, arah pembangunan tersebut berisiko menjadi retorika normatif belaka. Selain itu, lemahnya konsistensi implementasi kurikulum yang sering berubah mengikuti pergantian kepemimpinan politik dapat menyebabkan kebingungan di tingkat satuan pendidikan, merusak kredibilitas kebijakan dan pemborosan sumber daya (Gouédard *et al.* 2020). Di sisi lain, permasalahan sosial seperti tingginya akses remaja terhadap konten negatif akibat lemahnya peran sekolah sebagai ruang aman, kurangnya pengawasan orang tua, serta kurangnya kolaborasi keduanya dalam mendidik anak turut memperparah kondisi generasi muda (Giriani dan Hapsarani 2021). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi secara menyeluruh, ambisi Indonesia Emas bisa berubah menjadi “Indonesia Cemas”. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk

menjawab permasalahan yang ada, dengan fokus pada isu-isu utama yang berkaitan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Melalui studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan seperti jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, buku akademik, serta artikel dari media terpercaya. Data yang diperoleh, lalu kami analisis secara tematik untuk menemukan pola permasalahan dan solusi strategis. Berikut adalah hasil penelusuran yang dijabarkan dalam empat pilar akar perubahan yang harus dilaksanakan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari sistem pendidikan.

Reformasi Sistem Pendidikan: Kurikulum yang Konsisten dan Berbasis Karakter

Sistem Pendidikan Indonesia kerap berubah seiring pergantian kepemimpinan politik, terutama dalam hal kurikulum (Abidin *et al.* 2023). Hampir setiap pergantian Menteri Pendidikan membawa kebijakan baru yang berdampak langsung pada kurikulum, memaksa guru dan siswa untuk terus beradaptasi dalam waktu singkat tanpa arah yang konsisten (CIPS dan Tanoto Foundation 2024). Ketidakstabilan ini tidak hanya melelahkan secara administratif, tetapi juga menimbulkan kebingungan dalam implementasinya. Dampaknya terlihat jelas pada skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) Indonesia yang menunjukkan tren penurunan seiring pergantian kurikulum dari KTSP hingga Merdeka Belajar (Faizah 2024) menandakan rendahnya efektivitas perubahan yang dilakukan tanpa fondasi jangka Panjang. Sejalan dengan itu, survei Litbang Kompas (2025), menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik (Iswenda 2025), yang sering kali menghasilkan kebijakan populis dan minim pada orientasi jangka panjang (Monoarfa *et al.* 2022). Jika kondisi ini terus berlangsung, pendidikan tetap dijadikan



Grafik 1 Perbandingan Perolehan PISA Berdasarkan Kurikulum yang Berlaku di Indonesia (Sumber: OECD)

alat politik semata, bukan sebagai investasi strategis masa depan, maka sistem yang dihasilkan akan rapuh dan gagal dalam membentuk generasi yang tangguh secara intelektual maupun moral.

Sebagai perbandingan, Jepang mengganti kurikulumnya minimal 10 tahun sekali (Tsuneyoshi 2019). Pendekatan jangka panjang ini memungkinkan sistem pendidikan mereka lebih stabil dan berorientasi pada nilai-nilai mendasar. Indonesia dapat belajar dari praktik ini, dengan merancang kurikulum jangka panjang yang berbasis riset dan terbebas dari tarik-menarik kepentingan politik. Lebih dari itu, kurikulum masa depan Indonesia harus bersifat holistik, menekankan pendekatan interdisipliner dan tematik, serta terintegrasi dengan kehidupan nyata. Pendidikan semacam ini tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga nilai-nilai moral, keberlanjutan lingkungan, dan kesadaran sosial.

Di Indonesia, keberagaman geografis, sosial, dan budaya turut tantangan dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, menjawab tantangan tersebut pemerintah perlu menerapkan desentralisasi kurikulum yang tetap berpijak pada kerangka standar nasional yang kuat. Model ini memungkinkan daerah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal, tanpa kehilangan arah strategis pembangunan nasional. Pemerintah pusat (melalui Kemendikbudristek dan lembaga seperti BSNP) menetapkan Standar Nasional Pendidikan, misalnya Kurikulum pendidikan karakter. Selain itu, Pemerintah daerah dan sekolah diberi ruang untuk mengembangkan kurikulum

operasional sekolah yang fleksibel, kontekstual, dan inovatif sesuai kebutuhan lokal. Ini mencakup tema pembelajaran, metode, dan integrasi budaya serta isu lokal.

Kajian ini merekomendasikan kurikulum pendidikan karakter sebagai inti pembelajaran. Nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, empati, dan kemandirian perlu dibangun sejak dini secara terpadu dalam setiap aktivitas pendidikan. Untuk itu, pembelajaran harus berorientasi pada siswa (*student-centered*) melalui pendekatan berbasis pengalaman, kolaborasi, dan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) (Megawangi 2016). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif, tetapi juga memperkuat internalisasi nilai-nilai karakter dalam kehidupan nyata. Evaluasi pembelajaran pun perlu ditingkatkan melalui asesmen formatif, portofolio, refleksi diri, serta penilaian autentik yang lebih komprehensif dibandingkan tes pilihan ganda. Dengan demikian, kurikulum ini akan menghasilkan individu yang unggul secara akademik, tangguh secara moral dan sosial, mampu berpikir kritis, serta siap berkontribusi aktif bagi bangsa dan generasi mendatang.

Kesejahteraan Guru: Fondasi dari Pendidikan Berkualitas

Guru merupakan aktor utama dalam dunia Pendidikan (Gouédard *et al.* 2020; CIPS

Tabel 1 Perbandingan Gaji Guru di Asia Tenggara

Negara	Gaji Guru
Singapura	Rp33,67 – 49,30 juta (S\$2.800-4.100) Kurs Rp12.020 per S\$1
Thailand	Rp8,69 – 13,04 juta (฿18.000-27.000) Kurs Rp483 per ฿1
Malaysia	Rp8,06 – 13,92 juta (RM2.200-3.800) Kurs Rp3664 per RM1
Filipina	Rp5,32 – 6,73 juta (₱19.000-24.000) Kurs Rp280 per ₱1
Indonesia	Rp2,88 – 5,5 juta

(Sumber: [Katadata.co.id](https://katadata.co.id), Februari 2025)

dan Tanoto Foundation 2024). Kesejahteraan guru merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan (Adhi 2024). Sayangnya, kesejahteraan guru di Indonesia masih jauh dari kata sejahtera (Veirissa 2021). Dari segi gaji, terdapat ketimpangan yang mana hal ini bukan hanya mencerminkan rendahnya penghargaan terhadap profesi guru, tetapi juga berdampak langsung pada motivasi dan performa kerja mereka di lapangan (Adhiat 2023). Guru yang terus menerus dibebani tanggung jawab besar tanpa dukungan finansial yang memadai, sulit untuk fokus pada pengembangan diri maupun inovasi pembelajaran. Hal ini pada akhirnya akan menurunkan kualitas pengajaran dan memperlebar kesenjangan Pendidikan, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Sudah saatnya negara memperlakukan guru sebagai profesi yang profesional, bergengsi, dan layak secara finansial. Peningkatan gaji guru secara signifikan dan merata harus segera dilakukan, bukan hanya untuk guru ASN tetapi juga untuk guru honorer yang jumlahnya sangat besar. Riset Rwigema (2022), membuktikan korelasi positif antara kesejahteraan guru dengan kualitas pembelajaran. Guru yang sejahteralah yang mampu berdedikasi penuh, kreatif, serta berorientasi pada tumbuh kembang siswa. Mereka tidak sekedar mengajar, tetapi juga menjadi pembimbing, panutan, serta pembentuk karakter generasi bangsa. Tanpa guru yang berdaya, cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Lebih lanjut, kebijakan peningkatan kesejahteraan guru tidak boleh berhenti pada kenaikan gaji semata, tetapi harus diiringi dengan sistem rekognisi, pelatihan berkelanjutan, dan jenjang karier yang jelas (Napitupulu 2023; SREB 2024). Pemerintah perlu menempatkan profesi guru sebagai pilar strategis dalam pembangunan bangsa, bukan sekedar tenaga administratif pendidikan. Insentif berbasis kinerja, penguatan kompetensi pedagogis, dan perlindungan hukum guru (Aranditio 2024) wajib menjadi bagian integral dari reformasi pendidikan nasional. Jika Indonesia serius ingin mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045, maka meningkatkan kesejahteraan guru bukan hanya keharusan moral, tetapi juga investasi strategis jangka panjang yang mendesak untuk segera dilakukan.

Kolaborasi Orang Tua dan Sekolah: Menyatukan Visi Mendidik

Kolaborasi antara orang tua dan sekolah merupakan elemen esensial dalam membentuk proses pendidikan yang holistik dan berkelanjutan (Hands 2023). Reformasi tidak hanya menyentuh aspek kurikulum dan kebijakan, tetapi juga menuntut adanya sinergi antarpemangku kepentingan, terutama keluarga. Sayangnya, pada praktiknya di Indonesia masih banyak orang tua yang menyerahkan seluruh tanggung

jawab pendidikan pada institusi sekolah, padahal anak justru banyak menghabiskan lebih banyak waktu di lingkungan rumah (Prabowo 2024). Oleh karena itu, visi antara sekolah dan orang tua menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun ekosistem pendidikan yang partisipatif. Pendidikan adalah tanggung jawab kolektif, dan keberhasilannya sangat ditentukan oleh sejauh mana sinergi antara rumah dan sekolah terjalin.

Dalam upaya mewujudkan kolaborasi yang bermakna, dibutuhkan komunikasi yang aktif, saling pengertian, dan keterlibatan konkret dalam proses pembentukan karakter seperti kebiasaan belajar anak. Sekolah perlu membuka ruang partisipasi yang luas bagi orang tua, sementara orang tua perlu menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam mendampingi perkembangan anak baik secara akademis maupun emosional (Alam dan Hamzah 2025). Reformasi pendidikan harus mendorong inisiatif seperti forum komunikasi orang tua-guru, pelatihan parenting, dan keterlibatan langsung dalam proyek pembelajaran. Ketika orang tua dan guru berbagi visi yang selaras, anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan harmonis. Inilah fondasi penting bagi lahirnya generasi yang cerdas, mandiri, dan bermoral.

Fasilitas Sekolah: Penunjang yang Harus Mengikuti

Fasilitas sekolah seperti laboratorium yang lengkap, ruang kelas yang layak, toilet yang bersih, akses internet, serta sarana olahraga merupakan hal mendasar yang seharusnya tersedia di semua sekolah (Barrett *et al.* 2019). Namun, fasilitas tidak bisa menggantikan peran guru, sistem, dan lingkungan keluarga (Fitrianto 2022). Banyak sekolah dengan fasilitas sederhana mampu menghasilkan lulusan berkualitas karena ditopang oleh guru hebat dan sistem yang kuat. Sebaliknya, ada pula sekolah dengan fasilitas mewah tetapi minim prestasi karena miskin nilai dan orientasi belajar. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas harus dilakukan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan guru dan penguatan sistem. Pemerintah perlu melakukan pemetaan kebutuhan riil di lapangan dan memastikan anggaran tidak tersedot ke proyek fisik semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia yang ada di

dalamnya.

Sebagai bagian dari reformasi pendidikan, pembangunan fasilitas harus dirancang dalam kerangka strategis dan berkeadilan. Ketimpangan antarwilayah, khususnya di daerah terpencil yang masih kekurangan infrastruktur dasar pendidikan, tetap menjadi tantangan besar (Sihombing 2023). Karena itu, pendekatan pembangunan perlu berbasis data dan kebutuhan nyata, membangun yang benar-benar dibutuhkan bukan sekedar yang terlihat. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus menghindari jebakan simbolik pembangunan fisik yang tidak menyentuh substansi pendidikan. Fasilitas hanyalah sarana, yang menjadikannya bermakna adalah sistem pendidikan yang kuat, guru yang sejahtera, serta kolaborasi aktif antara sekolah dan orang tua. Ketika semua unsur ini berjalan selaras, barulah fasilitas menjadi penunjang yang efektif untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata.

Rekomendasi Kebijakan

Berikut adalah rangkuman rekomendasi kebijakan dalam reformasi sistem pendidikan yang telah kami identifikasi berdasarkan isu, akar masalah, serta aktor utama dalam implementasi kebijakan.

Tabel 2 Rangkuman Rekomendasi Kebijakan

Isu 1		Kurikulum yang tidak stabil
Akar Masalah		<ul style="list-style-type: none"> • Politik kebijakan yang tidak berkesinambungan • Tidak berbasis pada riset pendidikan yang komprehensif • Minimnya sinkronasi antara kurikulum nasional dan lokal • Tidak ada roadmap jangka panjang kurikulum nasional
Rekomendasi kebijakan		<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskur), serta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menetapkan Standar Nasional Pendidikan yang berlaku secara desentralistik. Standar ini mencakup kompetensi inti, capaian pembelajaran, nilai-nilai karakter, serta indikator minimum yang harus dicapai oleh seluruh siswa di Indonesia, berdasarkan hasil riset yang komprehensif. • Penetapan kurikulum minimal 10 tahun yang termaktub dalam perundang-undangan dan kurikulum pendidikan karakter sebagai fondasi utama. • Dibentuknya roadmap jangka panjang dari kurikulum nasional
Aktor utama		<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbudristek • Puskur • BSNP • Pemerintah Daerah • Sekolah
Isu 2		Kesejahteraan guru rendah
Akar Masalah		<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan status kepegawaian, penyebab ketidaksetaraan akses terhadap tunjangan dan fasilitas • Keterlambatan dan ketidakpastian pembayaran gaji atau tunjangan • Beban administratif yang tinggi, tidak seimbang dengan kompensasi • Distribusi guru yang tidak merata • Minimnya akses pengembangan profesional yang berkelanjutan
Rekomendasi kebijakan		<ul style="list-style-type: none"> • Standarisasi dan pemerataan gaji guru • Pemetaan dan redistribusi guru secara nasional • Perlindungan hak dan kesejahteraan guru yang tertuang dalam perundang-undangan • Desain karir dan profesionalisme guru, dengan membuat roadmap karir guru berbasis kompetensi dan kinerja.
Aktor utama		<ul style="list-style-type: none"> • Presiden dan sekretariat negara • Kemendikbudristek • Kemenkeu • Kementerian PAN-RB • Kemenaker • Pemerintah daerah
Isu 3		Perbedaan visi orang tua dan sekolah dalam mendidik anak
Akar Masalah		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya komunikasi dan kolaborasi rutin • Perbedaan paradigma pendidikan • Tingkat literasi pendidikan orang tua yang beragam
Rekomendasi kebijakan		<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah wajib membentuk Komite Kolaborasi Pendidikan (KKP) yang terdiri dari pihak sekolah dan orang tua untuk menyelaraskan visi dan misi mendidik. KKP layaknya organisasi yang memiliki struktur dengan orang tua terlibat aktif di dalamnya tidak hanya menjadi anggota. • Sekolah wajib mengadakan forum diskusi bulanan dan memberikan materi parenting dan filosofi pendidikan berdasarkan kurikulum yang digunakan kepada orang tua secara bertahap dalam bentuk seminar atau modul sederhana.
Aktor utama		<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah • Dinas Pendidikan Daerah (Disdik) • Kepala sekolah, guru dan orang tua/wali murid

Isu 4		Fasilitas sekolah yang masih belum memadai
Akar masalah	<ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan anggaran antar wilayah • Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi infrastruktur pendidikan • Ketergantungan proyek jangka pendek 	
Rekomendasi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah pusat perlu menetapkan skema anggaran khusus untuk fasilitas pendidikan berbasis kebutuhan riil dan terintegrasi dengan manajemen informasi sekolah yang ada di daerah. • Penetapan standar nasional fasilitas sekolah holistik dan pembentukan unit pemeliharaan terintegrasi (dari daerah ke pusat). 	
Aktor utama	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbudristek • Kemenkeu • Pemerintah daerah • Dinas Pendidikan Daerah (Disdik) • Sekolah dan Komite Kolaborasi Pendidikan (KKP) • Masyarakat dan Swasta 	

Daftar Pustaka

- Abidin D, Retnaningrum E, Parinussa JD, Kuning DS, Manoppo Y, Kartika IM. 2023. Curriculum development in Indonesia from a historical perspective. *Journal of Education Research*. 4(2):443–451.
- Adhi N. 2024. Pilar penting Merdeka Belajar: Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. *Tempo.co*. [diakses 2024 Okt 5] <https://www.tempo.co/info-tempo/pilar-penting-merdeka-belajar-peningkatan-kesejahteraan-dan-kompetensi-guru-15780>
- Adhiat A. 2023. Gaji guru di Indonesia sangat kecil dibanding negara tetangga. *Databoks.katadata.co.id*. [diakses 2024 Okt 5] <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/302576b241f4eef/gaji-guru-di-indonesia-sangat-kecil-dibanding-negara-tetangga>
- Alam S, Hamzah RA. 2025. The role of parental involvement in promoting education for sustainability in primary schools. *Asian Education and Development Studies*. 14(3):563–578. doi: 10.1108/AEDS-07-2024-0151
- Aranditio S. 2024. Guru kian terancam, usulan RUU perlindungan guru mencuat. *Kompas.id*, [diakses 2024 Nov 12] <https://www.kompas.id/artikel/guru-kian-terancam-usulan-ruu-perindungan-guru-mencuat>
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2025. *Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045*. Jakarta: Bappenas.
- Barrett P, Treves A, Shmis T, Ambasz D, Ustinova M. 2019. Baseline condition for learning. Di dalam: World Bank. The impact of school infrastructure on learning [Internet]. Washington (US): World Bank Group. hlm 1–71. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED604388.pdf>
- [CIPS] Center for Indonesian Policy Studies; Tanoto Foundation. 2024. The education policy and challenges (2017–2023). Di dalam: CIPS. *Education landscape in Indonesia*. Jakarta (ID): Center for Indonesian Policy Studies. hlm 81–84. <https://www.cips-indonesia.org/publications/education-landscape-in-indonesia>
- Dewi RK. 2019. Jokowi sebut cita-cita Indonesia di tahun 2045, apa saja? *Kompas.com*. [diakses 2024 Nov 27] <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/190800865/jokowi-sebut-cita-cita-indonesia-di-tahun-2045-apa-saja>
- Faizah. 2024. Hasil PISA, minimnya kemampuan literasi siswa Indonesia. *Kompasiana.com*. [diakses 2024 Nov 27] <https://www.kompasiana.com/faiszatun-nisak/67467f44ed64153d745c9af2/hasil-pisa-minimnya-kemampuan-literasi-siswa-indonesia>
- Fitrianto A. 2022. Fasilitas atau pendidik, mana yang lebih penting? *Kompasiana.com*. [diakses 2024 Nov 12] <https://www.kompasiana.com/agi2420/6280c3b418ffee20247dbd52/fasilitas->

atau-pendidik-mana-yang-lebih-penting?page=all&page_images=1#goog_rewrite

- Giriani NP, Hapsarani D. 2021. A discourse on sexuality and power in two Indonesian contemporary movies. *Di dalam: Proceedings of the International University Symposium on Humanities and Arts 2020 (INUSHARTS 2020)*; 2020 Nov; Jakarta (ID). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Vol. 593. hlm 194–199.
- Gouëdard P, Pont B, Hyttinen S, Huang P. 2020. *Curriculum reform: A literature review to support effective implementation*. OECD Education Working Papers No. 239. Paris (FR): Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/12/curriculum-reform_16f39dcc/efe8a48c-en.pdf
- Hands CM. 2023. School-community collaboration: Insights from two decades of partnership development. *Di dalam: Cleveland B, Backhouse S, Chandler P, McShane I, Clinton JM, Newton C, editor. Schools as Community Hubs*. Springer. hlm 31–40.
- Hutasuhut S, Siagian I, Silaban H, Sitio F, Silalahi H, Silva H, Naibaho D, Lahagu PH. 2025. Kesejahteraan guru di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research in Science and Advancement*. 3(1):227–235. doi: 10.61579/future.v3i1.277
- Iswenda BA. 2025. Intervensi politik dan bisnis jadi masalah utama dalam kebijakan pendidikan Indonesia. GoodStats. siap terbit. [diakses 2025 Jan 12]: <https://goodstats.id/article/intervensi-politik-dan-bisnis-menjadi-masalah-utama-dalam-kebijakan-pendidikan-indonesia-8ymON>
- Megawangi R. 2016. *Pendidikan karakter: Solusi yang tepat untuk membangun bangsa*. Edisi revisi. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.
- Monoarfa H, Tambingon HN, Rotty VNJ. 2022. Intervensi politik dalam dunia manajemen pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4(5):5894–5899.
- Muthiariny DE. 2019 Mei 9. Jokowi's vision for Indonesia: World's largest economy by 2045. Tempo English. [diakses 2024 Nov 27] <https://en.tempo.co/read/1203633/jokowis-vision-for-indonesia-worlds-largest-economy-by-2045>
- Napitupulu EL. 2023. Dukungan pengembangan diri guru belum memadai. Kompas.id. [diakses 2024 Nov 27] <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/15/dukungan-pengembangan-diri-guru-belum-memadai>
- Prabowo A. 2024 Sep 1. Indonesia nomor 2 di dunia: Menyerahkan pengasuhan kepada sekolah. Kompasiana.com. [diakses 2024 Nov 27] <https://www.kompasiana.com/arifprabowo3496/66d3ec13ed6415564073fda2/indonesia-nomor-2-di-dunia-menyerahkan-pengasuhan-kepada-sekolah>
- Rwigema DC. 2022. Impact of teacher's welfare on quality of education in East African community: Theoretical perspective. *Strategic Journal of Business & Change Management*. 9(1):675–720. doi:10.61426/sjbcm.v9i1.2217.
- Sihomebing R. 2023. Pemerataan pendidikan: Studi kasus 34 provinsi di Indonesia. *Parahyangan Economic Development Review*. 1(2):143–151. doi:10.26593/pedr.v1i2.6670.
- SREB. 2024. Teacher career pathways and advancement options. *SREB.org*. September:1–16. doi:10.4324/9781003450702-4.
- Tsuneyoshi R. 2019. *The Tokkatsu framework: The Japanese model of holistic education*. Singapore: World Scientific Publishing. https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789813232679_0001
- Veirissa AH. 2021. Kualitas guru di Indonesia. *Di dalam: Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS)*; 2021 Okt 27; Semarang (ID). Vol. 4. hlm 267–272.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Sri Rahayu, merupakan seorang mahasiswa pascasarjana Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, IPB University. (*Corresponding Author*)
Email: srningsih@apps.ipb.ac.id



Rafika Nanda, merupakan seorang mahasiswa pascasarjana Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, IPB University.



Dwi Hastuti, merupakan seorang Guru Besar bidang Ilmu Pengasuhan Anak di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University.



Telepon
+62 811-1183-7330



Email
dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat
Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680